



PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENANGGULANGI AKSI BALAP LIAR DI KOTA BANDUNG

Mochammad Ryan Ariansyah¹⁾, Toto Kushartono²⁾, Siti Munawaroh³⁾
 1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
 Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Aksi balap liar merupakan permasalahan yang kerap terjadi di kota-kota besar, termasuk Kota Bandung. Tindakan ini tidak hanya membahayakan keselamatan pengendara, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menanggulangi aksi balap liar serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap petugas Dinas Perhubungan dan masyarakat yang terdampak. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan studi dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan yang diterapkan di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bandung telah melakukan beberapa langkah strategis, seperti peningkatan patroli, penggunaan teknologi untuk pemantauan, serta koordinasi dengan aparat kepolisian. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal penegakan hukum yang lebih tegas dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat upaya yang signifikan, diperlukan peningkatan sinergi antar instansi serta pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat agar aksi balap liar dapat diminimalisir di masa depan.

Kata Kunci: Dinas Perhubungan, Balap Liar, Kota Bandung, Keamanan Jalan, Penanggulangan

Abstract

Illegal street racing in Bandung City is a social phenomenon that poses significant risks to the safety of riders and the public. This phenomenon disrupts public order and increases the rate of traffic accidents. This study aims to analyze the role of the Bandung City Transportation Department in addressing illegal street racing and to evaluate the effectiveness of the policies implemented. The research employs a qualitative approach, using in-depth interviews with Transportation Department officers and affected members of the community, as well as document analysis of related regulations and policies. The findings show that the Transportation Department has implemented several strategies, including enhanced patrols, the use of monitoring technology, and collaboration with the police. However, the main challenges identified include weak law enforcement and a lack of active public participation. This study concludes that, to reduce illegal street racing, stronger inter-agency collaboration, stricter law enforcement, and more intensive public education on the negative impacts of illegal racing are necessary.

Keywords: *Transportation Department, Illegal Street Racing, Bandung City, Traffic Safety, Mitigation*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, menegaskan bahwa segala aktivitas di wilayah Indonesia harus sesuai dengan hukum. Hukum bertujuan menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat, dan harus ditegakkan dengan adil oleh aparat penegak hukum. Hukum adalah aturan yang dibuat negara untuk mengatur perilaku warga, dengan tujuan menciptakan keadilan dan ketentraman (Isnantiana, 2019).

Menurut Ali Achmad (2002), hukum mencakup prinsip dan norma yang mengatur tindakan yang diperbolehkan atau dilarang negara. Penerapan hukum bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dan pelanggaran dapat dikenai sanksi.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan penegakan hukum yang adil untuk mencapai tujuan nasional. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Balap liar adalah contoh kejahatan jalanan yang marak terjadi di kota-kota besar. Balapan ilegal ini melibatkan kendaraan yang dipacu di jalan umum tanpa izin, sering kali melibatkan pelanggaran hukum lainnya, seperti perjudian dan kekerasan (Witono, 2014). Fenomena ini membahayakan masyarakat dan seringkali dilakukan oleh remaja yang kurang mendapat fasilitas yang memadai (Surharyanti, 2020).

Beberapa faktor yang mendorong pelaku balap liar antara lain kurangnya fasilitas dari pemerintah, keinginan untuk menjadi terkenal, gengsi antar kelompok, serta keuntungan finansial dari perjudian (Surharyanti, 2020). Meskipun balap liar dapat memberi dampak ekonomi positif bagi bengkel dan industri apparel, dampak negatifnya lebih besar, seperti kecelakaan dan kerugian lainnya.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melarang balap liar di jalan dan memberi sanksi kepada pelaku. Pihak kepolisian dan pemerintah daerah berupaya menanggulangi dengan patroli

dan razia di daerah rawan balap liar (Rosanti et al., 2015). Namun, aksi balap liar masih sering terjadi, seperti yang dilaporkan di Bandung pada 2020-2024, bahkan memakan korban jiwa (infobandungnews, 2020; Kompas.com, 2024).

Untuk mengatasi ini, diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, kepolisian, komunitas motor, dan masyarakat. IMI (Ikatan Motor Indonesia) juga mendorong fasilitas untuk para pelaku balap liar dengan menyediakan sirkuit yang aman (JabarEkspres, 2024). Selain itu, Polrestabes Bandung dan Pemerintah Daerah telah membentuk tim khusus untuk menangani balap liar secara lebih efektif (tribatanews.polri.go.id, 2024).

Dinas Perhubungan Kota Bandung harus berperan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam menanggulangi balap liar. Mereka perlu menegakkan regulasi, mengajak partisipasi masyarakat, menyediakan fasilitas yang mendukung, dan mempercepat perubahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengelola, membahas topik, mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan data dan menyimpulkan hasil dari penelitian. Di mana peneliti mengidentifikasi permasalahan dengan teliti serta memisahkannya menjadi komponen yang dapat diukur atau direpresentasikan dalam bentuk data numerik yang jelas dan terukur. Metode ini menggunakan strategi interaktif seperti observasi langsung, partisipatif, wawancara mendalam, pemeriksaan dokumen, dan teknik lainnya untuk menyelidiki perspektif partisipan. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan dan mengungkap fenomena (to describe and explore), serta untuk menggambarkan dan menjelaskan aspek-aspek yang terlibat (to describe and explain) (Siyoto, 2015).

PEMBAHASAN

Peran Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar Di Kota Bandung

Dalam pembahasan ini, peneliti mendeskripsikan mengenai Aksi balap liar di Kota Bandung sudah menjadi masalah sosial yang cukup serius, karena tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga membahayakan keselamatan para pelaku balapan maupun pengguna jalan lainnya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi berbagai pihak, terutama bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung yang memiliki tugas utama dalam mengelola transportasi dan keselamatan lalu lintas.

Peran Dinas Perhubungan sebagai Regulator

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengaturan transportasi, Dinas Perhubungan Kota Bandung harus bertindak sebagai regulator yang memberikan regulasi yang jelas mengenai larangan balap liar di jalan umum. Regulasi ini penting untuk menegaskan bahwa aksi balap liar bukanlah kegiatan yang sah dan dapat memberikan dampak buruk bagi keselamatan. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan dapat bekerja sama dengan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang melanggar aturan. Regulasi yang lebih ketat dan jelas diharapkan bisa menekan aksi balap liar yang sering terjadi di beberapa titik rawan di Bandung, seperti Jalan BKR, yang dikenal sebagai tempat favorit bagi para pelaku balapan liar.

Peran Dinas Perhubungan sebagai Dinamisator

Selain berfungsi sebagai regulator, Dinas Perhubungan juga memiliki peran sebagai dinamisator, yaitu mendorong kolaborasi antara berbagai pihak yang terkait, seperti Polrestabes Bandung, Satpol PP, organisasi masyarakat, hingga komunitas motor di Bandung. Dinas Perhubungan dapat memfasilitasi berbagai upaya pencegahan dengan mengadakan kampanye sosial yang mengedukasi masyarakat mengenai bahaya balap liar dan pentingnya ketertiban lalu lintas. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan dampak negatif dari balap liar dan mau bekerja sama untuk mencegahnya.

Namun, di lapangan, peran Dinas Perhubungan sebagai dinamisator belum sepenuhnya maksimal. Sebagian besar inisiatif dan upaya pencegahan lebih banyak dilakukan oleh kepolisian dan Satpol PP. Untuk itu, Dinas

Perhubungan perlu lebih aktif menggerakkan semua pihak yang terlibat dan menyatukan tujuan untuk menciptakan Bandung yang lebih aman dan tertib.

Peran Dinas Perhubungan sebagai Fasilitator

Dalam menanggulangi aksi balap liar, Dinas Perhubungan juga berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan alternatif yang lebih aman bagi para pelaku balap. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan menyediakan fasilitas seperti sirkuit balap yang aman dan sesuai standar. Saat ini, meskipun ada sirkuit-sirkuit yang cukup jauh dari Kota Bandung, seperti Sirkuit Sentul di Bogor, namun fasilitas balap di Bandung masih sangat terbatas.

Dinas Perhubungan bisa mendorong pemerintah kota untuk mempertimbangkan pembangunan sirkuit permanen di Bandung sebagai solusi jangka panjang. Dengan adanya fasilitas ini, para penggemar balap motor bisa menyalurkan hobinya dengan cara yang lebih terorganisir dan tentunya lebih aman.

Peran Dinas Perhubungan sebagai Katalisator

Sebagai katalisator, Dinas Perhubungan juga berperan dalam mempercepat perubahan dan mendorong terwujudnya kota yang lebih tertib dan aman. Salah satu contoh konkret adalah dengan memasang CCTV dan rambu-rambu lalu lintas di titik-titik rawan balap liar, seperti di Jalan BKR yang sering menjadi lokasi balapan liar. Pengawasan menggunakan teknologi ini dapat membantu aparat penegak hukum untuk mendeteksi dan menindak pelaku balap liar dengan lebih cepat.

Selain itu, pemasangan CCTV juga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, karena mereka tahu ada pengawasan yang ketat dari pihak berwenang. Ini akan membuat pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan aksi balap liar.

Sinergi dengan Pihak Terkait

Upaya Dinas Perhubungan dalam menanggulangi balap liar tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari

kepolisian, Satpol PP, IMI (Ikatan Motor Indonesia), hingga masyarakat luas. Seperti yang dilakukan oleh IMI Jawa Barat yang sudah mengusulkan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk menyediakan fasilitas balap resmi.

IMI juga telah bekerja sama dengan aparat keamanan untuk mengadakan acara balap yang legal dan aman, seperti “Night Roadrace” yang digelar oleh IMI dan TNI di Bandung. Ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat bisa menciptakan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah balap liar.

Evaluasi dan Tantangan

Meskipun berbagai upaya sudah dilakukan, masih banyak tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam mengatasi aksi balap liar. Salah satunya adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan balap liar. Untuk itu, dibutuhkan pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai bahaya balap liar, baik bagi para pelaku maupun masyarakat di sekitar lokasi balapan.

Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas juga diperlukan. Dinas Perhubungan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku balap liar benar-benar memberikan efek jera.

KESIMPULAN

Dinas Perhubungan Kota Bandung memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi aksi balap liar yang marak terjadi di kota ini. Sebagai regulator, Dinas Perhubungan perlu menyusun dan menegakkan regulasi yang tegas untuk mencegah aksi balap liar di jalan umum. Selain itu, sebagai dinamisator, Dinas Perhubungan harus lebih aktif mendorong kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti kepolisian, Satpol PP, serta komunitas motor, untuk menciptakan kesadaran bersama mengenai bahaya balap liar dan pentingnya ketertiban lalu lintas. Sebagai fasilitator, Dinas Perhubungan juga perlu memfasilitasi penyediaan tempat-tempat yang aman dan terstandarisasi untuk kegiatan balap, seperti sirkuit balap yang dapat menampung minat para penggemar balapan, sehingga mereka tidak perlu lagi menggelar balap liar di jalanan. Sebagai katalisator, Dinas Perhubungan dapat mempercepat perubahan dengan memasang CCTV dan rambu-rambu lalu lintas di titik-titik rawan balap liar untuk meningkatkan pengawasan dan deteksi pelaku. Namun, meskipun berbagai langkah sudah diambil, tantangan dalam mengatasi balap liar masih ada, seperti kurangnya fasilitas yang memadai dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang lebih baik antar pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan solusi jangka panjang.

yang lebih efektif. Dinas Perhubungan perlu lebih intensif dalam sosialisasi, serta mendorong penegakan hukum yang lebih tegas agar aksi balap liar dapat diminimalisir, dan Kota Bandung dapat menjadi kota yang lebih aman dan tertib bagi semua penghuninya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad. (2002). Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis / Achmad Ali. Jakarta : Jakarta : The World Bank 2002.
- Arif. (2012). Peran dan fungsi pemerintah.
- Isnantiana, N. I. (2019). HUKUM DAN SISTEM HUKUM SEBAGAI PILAR NEGARA.
- Rosanti, A., Fakultas, F., Universitas, H., Unggul, E., Utara, J. J. A., Tomang-Kebon, T., & Jakarta, J. (2015). BUDAYA HUKUM BALAP LIAR DI IBUKOTA. In Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota Lex Jurnalica (Vol. 12, Issue 1).
- Siyoto, S. (2015). Dasar Metodologi Penelitian.
- Surharyanti, N. (2020). STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN AKSI BALAPAN LIAR DI KALANGAN REMAJA. STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN AKSI BALAPAN LIAR DI KALANGAN REMAJA.
- Witoto, A. (2014). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR DI KABUPATEN BANTUL